eBulletin IDEOLOGI

EDISI 19
APRIL
2026

TIM KONTEN MPP PKS

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum..

Di tengah arus persepsi publik yang kerap memandang politik sebagai arena kering nilai dan sarat kepentingan, tulisan ini menghadirkan sudut pandang yang lebih dalam dan mendasar: bahwa politik, jika ditautkan dengan iman dan etika, justru menjadi ruang pengabdian yang bernilai ibadah. Melalui kerangka berpikir yang kokoh dan berakar pada tradisi keilmuan Islam, tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat ulang relasi antara kekuasaan, moralitas, dan tanggung jawab spiritual dalam kehidupan berbangsa.

Ditulis oleh Dr. H. Mulyanto, M.Eng., Ketua MPP PKS, gagasan ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mengalir sebagai refleksi strategis tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan: bukan sekadar untuk meraih kuasa, melainkan untuk menjaga nilai dan menghadirkan kemaslahatan. Di sinilah politik menemukan maknanya yang paling jujur—sebagai amanah, sebagai jalan pengabdian, dan pada akhirnya, sebagai ibadah yang menuntut integritas, keberanian, dan keikhlasan.

Selamat Membaca...

MPP PKS

eBuletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat (MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (KDP) baik AD/ART, Falsafah, Platform, GBKP, Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara jelas dan padat KDP untuk pengokohan IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting dibaca dan dihayati bagi pimpinan dan kader PKS. Juga untuk edukasi masyarakat luas agar lebih mengenal perjuangan PKS.

KEYAKINAN KAMI: POLITIK ADALAH IBADAH (Fondasi Nilai, Etika Kekuasaan, dan Spirit Pengabdian)

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
Ketua MPP PKS

Pendahuluan

Dalam persepsi publik modern, politik sering dipahami sebagai wilayah profan yang sarat dengan perebutan kekuasaan, kepentingan, dan kompromi nilai. Politik kerap diasosiasikan dengan intrik, konflik, dan praktik-praktik yang jauh dari etika. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru apabila politik dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab spiritual.

Namun, bagi PKS sebagai partai yang berazaskan Islam, politik yang berangkat dari nilai-nilai Islam, politik justru dipahami secara berbeda dan lebih mendalam: politik adalah ibadah.

Keyakinan bahwa politik adalah ibadah bukanlah slogan emosional atau romantisme ideologis, melainkan sebuah konstruksi nilai yang memiliki akar kuat dalam ajaran Islam dan tradisi pemikiran ulama.

Politik dipandang sebagai bagian dari amal shalih apabila diniatkan karena Allah, diarahkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa, serta dijalankan dengan cara-cara yang adil dan bermartabat.

Dengan kerangka ini, politik tidak lagi sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan ruang pengabdian dan amanah.

Islam sebagai Fondasi Nilai Politik

Islam diturunkan bukan hanya untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga untuk menata kehidupan sosial, hukum, dan kemasyarakatan.

Karena itu, Islam tidak memisahkan secara dikotomis antara wilayah ibadah ritual dan urusan publik.

Nilai-nilai Islam—seperti keadilan, amanah, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan pencegahan kezaliman—memiliki implikasi langsung dalam tata kelola masyarakat dan negara.

Dalam konteks ini, politik menjadi sarana untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Kekuasaan bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk menjaga dan menegakkan nilai. Tanpa nilai, kekuasaan kehilangan arah dan berubah menjadi dominasi. Tanpa kekuasaan, nilai kehilangan daya lindung dan daya ubah. Di sinilah letak signifikansi politik dalam perspektif Islam.

Al-Ghazali: Agama dan Kekuasaan sebagai Saudara Kembar

Relasi antara Islam dan politik telah lama dirumuskan secara jernih oleh para ulama klasik. Imam Abu Hamid al-Ghazali رحمه الله menegaskan hubungan fundamental antara agama dan kekuasaan dalam pernyataannya yang terkenal:

"*Ad-dīnu wa as-sulṭānu taw'āmān; ad-dīnu aslun wa as-sulṭānu ḥāris.*
Fa mā lā aṣla lahu fahuwā mahdūm, wa mā lā ḥārisa lahu faḍā'i'."

Artinya:
"Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah fondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Apa yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa yang tidak memiliki penjaga akan hilang."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam bukanlah wilayah yang terpisah dari agama, apalagi bertentangan dengannya. Kekuasaan berfungsi sebagai penjaga nilai, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Politik hadir untuk memastikan agar nilai-nilai agama tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Al-Ghazali juga secara implisit mengingatkan bahaya dua ekstrem: agama tanpa kekuasaan akan kehilangan daya lindung, sementara kekuasaan tanpa agama akan kehilangan arah moral. Karena itu, politik yang dijalankan untuk menjaga nilai-nilai Islam—dengan cara yang adil dan bermartabat—adalah bagian dari amal ibadah.

'Utsman bin 'Affan: Nilai Memerlukan Otoritas

Pandangan al-Ghazali tersebut diperkuat oleh hikmah kenegaraan dari Khalifah Rasyid ketiga, 'Utsman bin 'Affan r.a., yang menyatakan:

Politik kerap diasosiasikan dengan intrik, konflik, dan praktik-praktik yang jauh dari etika. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru apabila politik dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Namun, bagi PKS sebagai partai yang berazaskan Islam, politik yang berangkat dari nilai-nilai Islam, politik justru dipahami secara berbeda dan lebih mendalam: politik adalah ibadah.

"Innallāha yaz'u bis-sulṭān mā lā yaz'u bil-Qur'ān."

Artinya:
"Sesungguhnya Allah menegakkan dengan kekuasaan apa yang tidak dapat ditegakkan hanya dengan Al-Qur'an."

Pernyataan ini mengandung realisme politik yang sangat mendalam. Al-Qur'an adalah sumber nilai, petunjuk, dan hukum yang sempurna.

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua manusia patuh hanya dengan nasihat moral. Sebagian kebaikan memerlukan aturan yang mengikat dan otoritas yang sah agar nilai dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam kerangka ini, kekuasaan bukanlah pesaing wahyu, melainkan instrumen implementasi nilai wahyu. Kekuasaan memastikan bahwa keadilan tidak berhenti sebagai teks, hukum tidak menjadi seruan kosong, dan amanah tidak sekadar jargon moral. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan untuk menegakkan nilai Al-Qur'an adalah bagian dari pengabdian kepada Allah SWT.

Politik sebagai Ibadah dan Etika Perjuangan

Politik menjadi ibadah bukan karena label atau simbol keagamaannya, melainkan karena niat, tujuan, dan cara yang melandasinya. Aktivitas politik bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah, bertujuan menghadirkan kemaslahatan publik, dan dijalankan dengan etika yang luhur. Islam menegaskan bahwa tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang batil.

Tim Konten MPP PKS

Karena itu, politik sebagai ibadah menuntut standar akhlak yang tinggi: kejujuran dalam berkata dan bertindak, amanah dalam mengelola kekuasaan, keadilan dalam mengambil keputusan, serta kesabaran dalam menghadapi perbedaan. Kritik disampaikan secara beradab, persaingan dijalankan secara sehat, dan perbedaan dikelola tanpa kebencian.

Dengan etika inilah politik terjaga dari pragmatisme yang merusak dan oportunisme yang menghilangkan keberkahan perjuangan.

Pengkhidmatan kepada Umat, Bangsa, dan Negara

Keyakinan bahwa politik adalah ibadah menemukan manifestasi nyatanya dalam pengkhidmatan. Politik diarahkan untuk melayani rakyat, membela yang lemah, dan memperjuangkan kebijakan yang adil. Negara dipandang sebagai ruang amal, bukan musuh ideologis, dan kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan hak istimewa.

Dalam perspektif ini, perjuangan politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral, tetapi berlanjut pada tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan yang berkelanjutan. Inilah politik nilai, bukan politik semata-mata kepentingan.

Penutup

Keyakinan bahwa politik adalah ibadah merupakan fondasi ideologis yang menempatkan aktivitas politik dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Islam memberikan nilai, kekuasaan memberikan daya. Tanpa nilai, kekuasaan menjadi zalim; tanpa kekuasaan, nilai kehilangan perlindungan.

Dengan merujuk pada pandangan Imam al-Ghazali dan Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan, dapat ditegaskan bahwa politik dalam Islam adalah sarana menjaga dan menegakkan nilai, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Ketika dijalankan dengan niat yang ikhlas, tujuan yang maslahat, dan cara yang bermartabat, politik menjadi amal shalih yang bernilai ibadah —berdampak duniawi dan bernilai ukhrawi.

Inilah politik yang kami yakini: politik yang berakar pada iman, dijalankan dengan akhlak, dan diabdikan untuk keadilan serta kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.#

Tim Konten MPP PKS

EDISI 19 | APRIL 2026

BERITA MPP

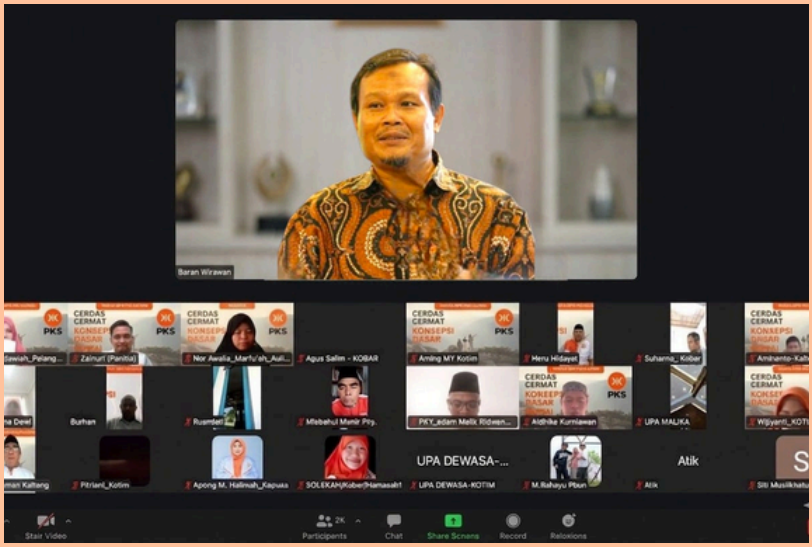

MPW PKS KALTENG GELAR LOMBA CERDAS CERMAT

UNTUK KOKOHKAN IDEOLOGI PARTAI, TINGKATKAN LITERASI DAN PERLUAS WAWASAN KEBANGSAAN & KEPARTAIAN

PALANGKA RAYA – Dalam upaya memperkuat fondasi pemikiran dan militansi kader, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Tengah menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Konsepsi Dasar Partai pada Ahad (19/04/2026). Acara yang berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting ini menjadi ajang strategis untuk menguji sekaligus mempertajam pemahaman ideologi para Anggota Pelopor se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera Baran Wirawan yang juga memberikan arahan sekaligus membuka acara. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai perjuangan yang tertuang dalam dokumen fundamental partai.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong Anggota Pelopor PKS Kalimantan Tengah untuk rajin membaca, membedah, dan memahami naskah-naskah perjuangan Partai agar tidak kehilangan arah di tengah dinamika politik yang cepat. Juga ingin memastikan bahwa setiap gerak kepartaian selalu selaras dengan kepentingan nasional dan kecintaan terhadap NKRI," ucapnya.

Dengan mengusung tema "Kokohkan Ideologi Partai, Tingkatkan Literasi, dan Perluas Wawasan Kebangsaan dan Kepartaian", kegiatan ini bukan sekadar kompetisi adu ketangkasan menjawab soal. Lebih dari itu, kegiatan ini dirancang sebagai stimulus bagi para kader untuk kembali menyelami Konsepsi Dasar Partai (KDP) sebagai kompas dalam berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"KDP merupakan hasil penggalian prinsip Islam rahmatan lil 'alamin yang diselaraskan dengan empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pemahaman yang mendalam terhadap Konsepsi Dasar Partai adalah syarat mutlak bagi Anggota Pelopor.#

EDISI 19 | APRIL 2026

BERITA MPP

PERKOKOH VISI BERNEGARA, MPP PKS PERKUAT PLATFORM PEMBANGUNAN INDONESIA

JAKARTA - Sebanyak 287 anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari berbagai wilayah berkumpul dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah (BPPW) PKS di Hotel Ciputra, Jakarta, pada Rabu, (8/4/2026).

Pertemuan strategis ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya memperkuat fondasi ideologis dan teknokratis para pejabat publik PKS dalam mengawal pembangunan di daerah masing-masing.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Kebijakan Publik MPP PKS, Memed Sosiawan, membedah materi krusial bertajuk "Urgensi Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia". Dalam paparannya, Memed menekankan bahwa Platform PKS bukanlah sekadar dokumen politik, melainkan sebuah proposal bernegara dan peta jalan (road map) yang komprehensif.

"Platform ini adalah panduan peran dan kontribusi nyata PKS dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Kita ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir dari tangan legislator PKS memiliki arah yang jelas dan berpihak pada rakyat," ujar Memed di hadapan ratusan peserta.

Tujuan materi Platform PKS ini adalah memberikan pemahaman mendalam bagi para pejabat publik PKS mengenai cara kerja platform sebagai instrumen pembangunan.

MPP PKS berharap, sepulangnya dari agenda ini, para anggota legislatif mampu melakukan sinkronisasi visi pusat dengan kebutuhan riil di daerah dan mendorong setiap legislatornya untuk mampu menerjemahkan platform nasional ke dalam program kerja yang konkret di wilayah dan daerah.

Menutup rangkaian kegiatan, ditekankan bahwa tantangan Indonesia di masa depan akan semakin kompleks dan berat. Dalam situasi tersebut, peran pejabat publik PKS dianggap menjadi kunci vital dalam menjaga stabilitas dan kemajuan pembangunan.#